

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Temuan dari penelitian yang dilakukan menunjukkan tentang evaluasi kinerja Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) di Kota Mojokerto berlandaskan kriteria evaluasi kebijakan Dunn (2014) menunjukkan kesimpulan berikut:

1. Pada fokus efektivitas, Program BRS belum sepenuhnya tercapai karena pada tahun 2025 target program tidak tercapai. Dari 147 unit yang ditargetkan, hanya 64 unit yang terealisasi. Ketidaktercapaian tersebut dipengaruhi oleh ketidaksesuaian data usulan dengan kondisi aktual rumah, hasil verifikasi lapangan, serta perubahan kondisi calon penerima sebelum program dilaksanakan. Meskipun demikian, Program BRS tetap berkontribusi terhadap perbaikan kondisi rumah penerima bantuan.
2. Pada fokus efisiensi, penggunaan anggaran Program BRS telah diarahkan pada kebutuhan utama perbaikan rumah, yaitu material bangunan dan upah tukang. Pelaksanaan fisik rumah juga berlangsung relatif singkat, yaitu sekitar 7 sampai 16 hari. Namun, dari sisi waktu administratif, program belum efisien karena proses penghimpunan usulan, verifikasi, hingga penetapan penerima membutuhkan waktu cukup panjang.
3. Pada fokus kecukupan, bantuan Program BRS bersifat relatif karena bergantung pada tingkat kerusakan rumah dan cakupan bagian rumah yang diperbaiki. Bantuan dapat mencukupi pada rumah dengan kerusakan sedang, tetapi belum selalu mencukupi pada rumah dengan kerusakan berat. Oleh

karena itu, kemampuan swadaya penerima dan arahan TFL berpengaruh terhadap hasil perbaikan rumah.

4. Pada fokus pemerataan, distribusi manfaat Program BRS telah menjangkau seluruh kecamatan di Kota Mojokerto, yaitu Prajurit Kulon, Magersari, dan Kranggan. Jumlah penerima pada setiap kecamatan tidak sama karena bantuan tidak dibagi berdasarkan kuota wilayah, melainkan berdasarkan usulan, verifikasi, dan kebutuhan masyarakat sasaran.
5. Pada fokus responsivitas, Program BRS memperoleh tanggapan positif dari masyarakat karena program dirasakan membantu memperbaiki rumah yang sebelumnya sulit diperbaiki secara mandiri. Responsivitas juga terlihat dari adanya pendampingan, penyesuaian terhadap preferensi masyarakat, serta partisipasi swadaya dalam bentuk dana, tenaga, konsumsi, maupun gotong royong.
6. Pada fokus ketepatan, Program BRS dinilai tepat karena diarahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni. Model bantuan stimulan berbasis swadaya juga sesuai dengan kondisi penerima karena tidak mewajibkan swadaya dalam bentuk uang. Program ini bermanfaat bagi penerima bantuan, meskipun pada rumah dengan kerusakan berat hasil perbaikan masih bergantung pada kemampuan swadaya tambahan.

Secara keseluruhan, evaluasi kinerja Program Bantuan Rumah Swadaya di Kota Mojokerto menunjukkan bahwa program telah memberikan manfaat bagi masyarakat sasaran dan mendukung peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Namun, kinerja program belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat target

yang tidak tercapai, hal tersebut dikarenakan data usulan yang telah diverifikasi lapangan tidak sesuai dengan kriteria program, proses administratif yang cukup panjang yang memicu perubahan kondisi social calon penerima bantuan, serta keterbatasan kecukupan bantuan pada rumah dengan kerusakan berat.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian terkait Evaluasi Kinerja Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) di Kota Mojokerto dengan berlandaskan enam kriteria evaluasi kebijakan (Dunn, 2014), sejumlah saran yang dapat disampaikan, diantaranya:

1. Pemerintah Kota Mojokerto melalui DPUPRPERAKIM perlu memperjelas acuan kriteria awal dalam proses pengusulan calon penerima bantuan, terutama terkait kondisi rumah yang termasuk tidak layak huni. Acuan tersebut dapat membantu agar calon penerima yang diajukan lebih sesuai dengan sasaran Program BRS sebelum dilakukan verifikasi lapangan. Dengan demikian, verifikasi lapangan tetap berfungsi sebagai tahap untuk memastikan kondisi aktual rumah sebelum bantuan direalisasikan.
2. Pemerintah Kota Mojokerto melalui DPUPRPERAKIM disarankan untuk menata rentang waktu antar tahapan administratif Program BRS, mulai dari pengusulan, penetapan penerima, hingga pelaksanaan perbaikan rumah. Hal ini diperlukan karena rentang waktu yang terlalu panjang dapat menyebabkan perubahan kondisi calon penerima sebelum program direalisasikan, seperti adanya calon penerima yang telah memperbaiki rumahnya secara mandiri. Dengan tahapan administratif yang lebih singkat

dan tertata, pelaksanaan program dapat lebih sesuai dengan kondisi calon penerima pada saat bantuan direalisasikan.

3. Pemerintah Kota Mojokerto melalui DPUPRPERAKIM dapat mempertimbangkan tambahan dana stimulan bagi penerima manfaat dengan kondisi rumah yang membutuhkan perbaikan lebih banyak. Hal ini karena bantuan Program BRS diberikan dengan nominal yang sama, sedangkan kondisi rumah dan kebutuhan perbaikan setiap penerima tidak selalu sama. Selain itu, penerima bantuan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kemampuan untuk menambah biaya perbaikan secara mandiri juga terbatas.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memfokuskan kajian pada penyebab ketidaksesuaian data usulan dengan kondisi aktual rumah, dampak panjangnya tahapan administratif terhadap perubahan kondisi calon penerima, serta kesesuaian besaran bantuan dengan tingkat kerusakan rumah. Dengan demikian, penelitian berikutnya dapat memberikan rekomendasi yang lebih mendalam untuk memperbaiki kelemahan Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) di Kota Mojokerto.